

DAFTAR PUSTAKA

Halim, A. (2007). *Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Penerbit Salemba Empat.

IAI. <https://www.scribd.com/doc/76222442/Binsar-Paper-Kongres-Iai-9-Des-Implementasi-Akrual>

Indonesia. Menteri Dalam Negeri. *Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Penerapan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah (SAKD)*. Retrieved November 12, 2014, from http://hukum.unsrat.ac.id/men/permendagri_13_2006.pdf

Kartikahadi, H. (2016). *Akuntansi keuangan berdasarkan SAK berbasis IFRS*, Edisi 2 Buku 1. Jakarta: Ikatan Akuntan Indonesia.

Kema, I. (2013). Penyajian laporan keuangan daerah berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan pada Pemerintah Kota Manado. *Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 1(3), 771-781. <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/2215>

KSAP. (2006). Memorandum pembahasan penerapan basis akrual dalam akuntansi pemerintahan di Indonesia.

Nugraheni, Purwaniatidan Subaweh. (2008, April) "Pengaruh Penerapan SAP Terhadap Kualitas Laporan Keuangan", *Jurnal Ekonomi Bisnis* 13(1), 49.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 18 Tahun 2016. Tentang Perangkat Daerah. Jakarta.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 71 Tahun 2010. *Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan*. Jakarta.

Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64. Tahun 2013. Tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis AkruaI pada Pemerintah Daerah. Jakarta.

Sasana, H (2012). Pengaruh belanja pemerintah daerah dan pendapatan perkapita terhadap indeks pembangunan manusia. *Media Ekonomi dan Manajemen*, 25(1), 1-12

Simanjuntak, B. (2010). Penerapan Akuntansi Berbasis AkruaI di Sektor Pemerintahan di Indonesia. Jakarta: Kongres XI Tanjung, A. H. (2012) Akuntansi pemerintahan berbasis akruaI pendekatan teknis sesuai PP No. 71/2010. Bandung: Alfabeta.

Supriyadi, B., Suwarda, D., & Manghayu, A. (2017). Kebijakan akuntansi akruaI pemerintahan daerah. Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia.

Tampanatu, A. P. T 2013. Analisis Pencatatan dan Pelaporan Belanja Langsung pada SKPD dikota Bitung. *Junal EMBA Vol.1 No 4*. Diakses 2 November 2021

Undang-

Undang Republik Indonesia. No. 33 Tahun 2004. Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. Jakarta.